

Transtel

Volume III No. 1-Januari 2005

MEDIA



Lintas Darat:
Kecelakaan di Jalan
Pembunuh Nomor Tiga

Lintas Cuaca:
Tsunami Hancurkan
Sarana Transportasi

Lis Dahlia
Sebagai isteri Pilot
Cemas juga

Kiat DEPHUB
Dalam 100 Hari





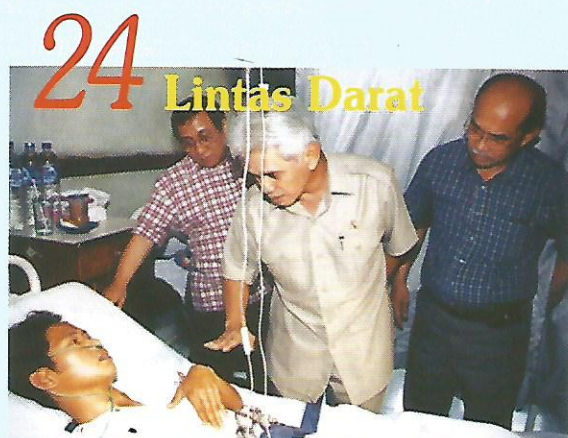
6 Topik Utama

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa bisa dikatakan salah seorang menteri tersibuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Bayangkan, baru saja dilantik 21 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, langsung dihadapkan pada tugas-tugas yang cukup sibuk. Menghadapi arus mudik dan balik Lebaran. Apa kiprah Hatta Rajasa dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu?

Pesawat Lion Air
30 Nopember lalu
terjerembab di
Bandara
Adi Sumarmo.
Sejumlah penumpang
mengaku tak
menyangka peristiwa
itu terjadi. Siapa
bersalah?



12 Topik Khusus



24 Lintas Darat

Peristiwa kecelakaan di jalan raya di Indonesia ketiga tertinggi di ASEAN. Lebih dari 30 ribu nyawa melayang. Dephub kini sedang menyiapkan *Blue Print* keselamatan transportasi.

BERITA LAINNYA

Dari Redaksi	3
Mimbar Pembaca	4
Editorial	6

TOPIK UTAMA

• Kiat 100 Hari Dephub	7
• Pelayanan Publik Tolok Ukur Keberhasilan Dephub	8

TOPIK KHUSUS

• Pesawat Lion Air Tergelincir	12
• Seluruh Bandara Perlu di Evaluasi	14
• Santunan Bagi Para Korban	15

NASIONAL

• Kesejahteraan Rakyat Terganjil Korupsi ..	16
• Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur	18
• Kenaikan BBM Mencari Opsi Berkeadilan	20

OPINI

• Mengenal BPSK bagi Konsumen Jasa Transportasi	22
---	----

LINTAS DARAT

• Kecelakaan di Jalan Pembunuh Nomor Tiga	24
• MRT Langkah Strategis Atasi Kemacetan	26

LINTAS LAUT

• Menanti Inpres Pemberdayaan Pelayaran Nasional	28
--	----

LINTAS UDARA

• Awal 2005 Adbandara Harus Sudah Kerja	30
• Angkutan Haji Sudah Siap	31

ARAH

• Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	32
---	----

LINTAS CUACA

• Hati-hati bencana masih mengancam: Bencana Itu Sangat Memilukan	34
---	----

TELEKOMUNIKASI

• Kontroversi Perubahan Kode Akses	36
• Jamaah Haji Pangsa Pasar Menggiatkan ..	37

LINTAS WARTA

• PT. KAI Daop II Untung Rp. 11,852 miliar	38
• Jabatan Dirut Indosat segera diisi	38
• Kontrak Boot Pelindo I - Metro Indonesia ..	38
• Busway Koridor III selesai Desember 2005	39
• Gerbang KRL dari Jepang	39

SIAPA DIA

.....	40
-------	----



Design Cover: Ersoe



Mengenal BPSK bagi Konsumen Jasa Transportasi

Oleh : Yulianto Syahyu SH, MH

Setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini wajib dilindungi keselamatan dan keamanannya oleh pemerintah dalam menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) salah satu Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen, yang menggunakan barang atau memanfaatkan jasa. Ruang lingkup jasa yang begitu luas dalam tulisan ini akan memfokuskan pada aspek jasa transportasi.

Jasa transportasi sebagai bagian dari sarana perhubungan merupakan kepentingan umum yang harus dikelola oleh negara yang dalam hal ini sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga jika terjadi ketidakpuasan anggota masyarakat selaku konsumen jasa transportasi umum maka yang bersangkutan dapat mengajukan klaim atau tuntutan kepada pihak mana yang menyediakan jasa transportasi tersebut khususnya dan pemerintah pada umumnya.

Di berbagai negara telah muncul lembaga penyelesaian sengketa yang merupakan bagian dari sistem peradilan atau setidaknya menjalankan fungsi peradilan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa berskala kecil. Secara umum lembaga tersebut dikenal dengan istilah *Small Claims Court*. Di Hongkong disebut dengan *Small Claims Tribunal* (SCT), di Malaysia disebut dengan *Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia* (TTPM).

Di Indonesia dikenal adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun baru dapat dibentuk secara de jure dengan Keputusan Presiden RI No. 90 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dari Sekretariat BPSK. Secara de facto BPSK baru terbentuk pada tahun 2002 bersamaan dengan dilantikannya anggota BPSK berdasarkan Kepmenperindag RI No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada pemerintahan kota Makassar, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Medan.

Dengan demikian, kini penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara:

Pertama, penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kedua, Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaitu dengan penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha sendiri; dengan cara mengadu pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); dengan cara mengadu pada BPSK.

Dalam hal ini tidak ada kriteria atau batasan kasus atau perkara apa yang menjadi kompetensi lembaga penyelesaian sengketa konsumen tersebut, dengan kata lain semua diserahkan sepenuhnya pada konsumen sendiri.

Sesuai pasal 49 ayat (3) dan (4) UUPK, setiap BPSK beranggotakan tiga unsur. Yaitu, unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha, yang tiap unsurnya terdiri dari 3 - 5 orang dengan

persyaratan tertentu. Struktur BPSK sendiri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota (pasal 50 UUPK). Dalam menjalankan tugasnya anggota BPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat (pasal 51 UUPK).

Tugas dan kewenangan BPSK tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen semata, namun juga meliputi tugas dan kewenangan perlindungan konsumen lain (penyelesaian sengketa dalam arti luas termasuk upaya preventif).

Dalam bidang penyelesaian sengketa konsumen baik dalam UUPK maupun dalam Kepmenperindag, tidak terdapat batasan mengenai kasus/perkara apa saja yang tidak boleh ditangani oleh BPSK. Dalam pasal 1 butir 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 hanya disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Jadi dapat ditafsirkan bahwa semua sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut, merupakan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya.

BPSK yang menurut konsepnya merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ternyata dalam realitanya sangat terkait dengan sistem peradilan umum baik perdata maupun pidana. Keterkaitan tersebut nampak dalam ketentuan yang mengatur.

Putusan Majelis BPSK (harus) dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan (Ps 57 UUPK jo. Ps 42 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001).

Para pihak (konsumen dan/atau pelaku usaha) yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Ps 58 ayat (2) UUPK).

Apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik atau melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Ps 56 ayat (4) UUPK jo. Ps 41 ayat (6) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001).

Keberatan BPSK merupakan langkah maju untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen serta memberikan hak-hak yang pantas bagi mereka, terutama dalam mendapatkan jasa pelayanan jasa pelayanan umum seperti jasa angkutan (transportasi) yang masih jauh dari harapan. Kiranya perlu ditingkatkan sosialisasi keberadaan BPSK serta pemanfaatannya kepada masyarakat. Seperti halnya dalam kasus kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air baru-baru ini di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Jika setelah dilakukan investigasi dan penyelidikan atas kecelakaan tersebut, ternyata diketahui ada unsur kelalaian dari pihak perusahaan penerbangan atau perusahaan pengelola bandara atau pemerintah (selaku pengambil kebijakan) maka BPSK adalah salah satu alternatif lembaga penyelesaian hukum bagi para korban atau keluarganya. ■

Penulis adalah, Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta.